

SIARAN PERS

Forum Pembangunan Daerah 2023

“Mendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan dan Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”

Kupang, 27 September 2023 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus melakukan berbagai upaya guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayahnya. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, The SMERU Research Institute (SMERU) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT menyelenggarakan **Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2023: “Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan serta Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”** pada hari ini, bertempat di Aula Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Tantangan Pembangunan di Nusa Tenggara Timur

Pertumbuhan ekonomi NTT yang bertumpu pada sektor pertanian mengalami guncangan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi provinsi ini menyentuh angka negatif (-0,84%), meskipun sektor pertanian saat itu tetap tumbuh positif sebesar 0,95%. Pada 2022, situasi membaik dan pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 3,05%, namun, belum menyamai angka pertumbuhan sebelum masa pandemi. Di sisi lain, NTT juga masih menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan dan ketimpangan. Dalam sepuluh tahun terakhir, tingkat kemiskinan provinsi ini terus berada di atas rata-rata nasional. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan tinggi di NTT pada umumnya mengalami tantangan dalam hal rendahnya capaian pendidikan, akses mendapatkan air layak, dan kemampuan memperoleh fasilitas kesehatan.¹

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, SH, M.Si., mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT terus melakukan berbagai upaya guna mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Ia juga menyambut baik kegiatan FPD yang melibatkan organisasi-organisasi di luar pemerintah yang bertujuan mendukung pembangunan di NTT. “Kita harus membuka hati dan pikiran terhadap masukan dan hal-hal baru supaya kita tidak fokus sama hal yang itu-itu saja,” ujar Kosmas.

Dr. Frits Fanggidae, akademisi dari Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, mengatakan, pada tataran perencanaan, sudah terdapat koherensi antara pembangunan ekonomi dan SDM di NTT. Namun, hasilnya belum memperlihatkan konvergensi yang kuat. Menurut Frits, kemiskinan di NTT cukup rumit karena sebagian besar penduduk miskin mempunyai pengeluaran yang rendah dan jumlahnya jauh lebih rendah dari garis kemiskinan. Ia juga menyoroti soal penyerapan pada pasar tenaga kerja di NTT, di antaranya sebagian besar tenaga kerja berpendidikan SD, sebagian besar angkatan kerja laki-laki bekerja di sektor yang

¹ BPS (2023), *Ringkasan data dan informasi kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022*

menghasilkan bahan baku (pertanian, pertambangan, transportasi), dan sebagian besar angkatan kerja perempuan bekerja di sektor yang menciptakan nilai tambah (industri pengolahan dan perdagangan). Lebih lanjut ia menambahkan, perlu ada solusi berbasis multidimensi, perbaikan data kemiskinan, serta perbaikan struktur angkatan kerja menuju sektor yang lebih produktif melalui pendidikan vokasi.

Sementara itu, Direktur SMERU, Ir. Widjajanti Isdijoso, M.Ec. St., menekankan pentingnya memfokuskan perhatian pada anak dan pemuda dalam pembangunan di NTT. Dalam paparannya, Widjajanti mengatakan tingkat kemiskinan anak di NTT selalu lebih tinggi dari tingkat kemiskinan total sehingga hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari para pembuat kebijakan. “Selain itu, capaian pendidikan hingga tingkat pendidikan menengah-pertama membaik, tetapi di tingkat menengah-atas stagnan. Dari sisi kesehatan, akses ke air minum yang aman dan sanitasi meningkat, tetapi masih perlu terus ditingkatkan,” terang Widjajanti.

Riset, Kolaborasi, dan Kebijakan untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Di samping berbagai tantangan yang ada, NTT juga memiliki banyak peluang yang belum dimaksimalkan. Modal dasar pembangunan provinsi ini meliputi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, pariwisata, keragaman budaya, serta SDM. Dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan di NTT, diperlukan peran dari riset, kolaborasi, dan kebijakan.

Definisi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu diiringi dari para pemangku kepentingan di daerah. Pemahaman ini perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan ekonomi inklusif yang dibangun oleh Pemerintah Pusat. Riset mendalam diperlukan untuk mengetahui akar masalah. Selain itu, pertukaran informasi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, berbagai sektor, dan para pemangku kepentingan memerlukan suatu wadah diskusi, seperti forum pembangunan daerah, yang dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran mengenai peran yang berbeda-beda dari para pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Dalam konteks kebijakan, salah satu isu utama adalah ketersediaan data yang akurat serta koordinasi yang efektif antara perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah provinsi dengan pelaksanaan yang sebenarnya.

Riset, kolaborasi, dan kebijakan yang cermat akan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan benar-benar merangkul semua lapisan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi:

Muhammad Harits Kamaaluddin
Staf Komunikasi Junior
The SMERU Research Institute
mkamaaluddin@smeru.or.id | 0877 2049 2605

Materi presentasi para pembicara dapat diunduh di <https://smeru.or.id/id/event-id/forum-pembangunan-daerah-2023>

Tentang Forum Pembangunan Daerah (FPD)

Forum Pembangunan Daerah (FPD) merupakan forum tahunan yang diselenggarakan The SMERU Research Institute (SMERU) bekerja sama dengan pemerintah provinsi di berbagai daerah. Forum ini telah dilaksanakan sejak 2016 untuk memfasilitasi dialog kebijakan dan penyebaran hasil-hasil penelitian, baik yang dilakukan SMERU maupun lembaga-lembaga lain. Dialog kebijakan di tingkat daerah ini dilatarbelakangi pentingnya peranan daerah, khususnya kerja sama antarberbagai pemangku kepentingan—baik pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak terkait lainnya—dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Tentang The SMERU Research Institute (SMERU)

SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. SMERU secara aktif berupaya mendorong kebijakan promasyarakat miskin di tingkat nasional dan daerah melalui bukti berbasis hasil penelitian. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di www.smeru.or.id.